



SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎ (0335)

Fax. (0335) 421431

Email: dinsos.probolinggokota@gmail.com

PROBOLINGGO



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raya Dringu No. 13, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67271

Telepon (0335) 421431, Faksimile (0335) 421432

Laman dinsosppa.probolinggokota.go.id, Pos-el dinsosp3a@probolinggokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR: 000.8.6.3/06/425.109/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diperlukan pedoman indikator kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja masing-masing pejabat eselon II dan III melalui penyusunan Indikator Kinerja Individu;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing eselon II dan III di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
 - c. Meningkatkan kinerja individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu diubah dalam penetapan ini maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19670711 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas : a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	$\left(\frac{\text{Jumlah PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial}}{\text{Total Jumlah PSKS yang terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
		2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	$\left(\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Total PPKS yang terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
		3. Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	$\left(\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Total PPKS yang terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
		4. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	$\left(\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Penanganan Bencana}}{\text{Total PPKS yang terdampak bencana}} \right) \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
		5. Presentase TMP yang terkelola	$\left(\frac{\text{Jumlah TMP yang Terkelola}}{\text{Total TMP yang Terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kapasitas	1 Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber	$\left(\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total PSKS yang Terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif	Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat		dan Masyarakat
3.	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	1 Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	$\left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Berperan dalam PUG}}{\text{Total Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Terdata}} \right) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		2 Persentase data gender dan anak yang terpilah	$\left(\frac{\text{Jumlah Data yang Sudah Terpilah Gender dan Anak}}{\text{Total Data yang Dikumpulkan}} \right) \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	1 Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Perempuan yang Tertangani dengan Baik}}{\text{Total Kasus Perempuan yang Diterima}} \right) \times 100\%$	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak dan UPTD PPA
		2 Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	$\left(\frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator yang Ditetapkan}} \right) \times 100\%$	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak dan UPTD PPA

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3 Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang Tertangani dengan Baik}}{\text{Jumlah Kasus yang Diterima}} \right) \times 100\%$	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak dan UPTD PPA
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	1 Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	$\left(\frac{\text{Jumlah Urusan yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Urusan yang Ditargetkan}} \right) \times 100\%$	Sekretariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan	:	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas	:	<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;b. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;c. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;d. pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;e. pelaksanaan administrasi umum Dinas;f. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;g. pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dani. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Butir Kegiatan	:	-

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatkan pencapaian Kinerja dan Pengelolaan Program Kegiatan	1	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Capaian Kinerja Kegiatan yang mencapai minimal 80% ----- x 100 Seluruh capaian kinerja kegiatan	Data RKPD triwulanan, Realisasi Keuangan SKPD
		2	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Capaian kinerja administrasi keuangan yang terlaksana ----- x 100 Seluruh capaian pelaksanaan administrasi keuangan	Data RKPD triwulanan, Realisasi Keuangan Prog Kegiatan,
		3	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Pelaporan BMD yang terpenuhi dan disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah dokumen Laporan BMD yang harus dipenuhi	Data BMD
		4	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Pelaporan Realisasi Pendapatan yang terpenuhi dan disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah dokumen / Laporan Pendapatan yang harus dipenuhi	Data Realisasi Pendapatan SKPD
		5	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Pelaporan administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dan disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah dokumen / laporan kepegawaian yang harus dipenuhi	Simpeg, Data Analisa Kepegawaian, DUK
		6	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Pelaporan administrasi umum yang terpenuhi dan disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah dokumen / laporan administrasi umum yang harus dipenuhi	Capaian Kinerja Pelayanan SKPD, SPP, SOP
		7	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah pemenuhan BMD yang terpenuhi ----- x 100 Jumlah seluruh kebutuhan BMD	RK BMD, Laporan BMD berkala
		8	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Jumlah pemenuhan kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi ----- x 100 Jumlah seluruh kebutuhan BMD	Data Arsip Dokumen kedinasan, Disposisi

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
2	Laporan capaian Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Internal SKPD terlaksana dan tersusun sesuai kaidah yang ditentukan	9	Persentase BMD yang terpelihara	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan BMD yang terlaksana ----- x 100 Jumlah seluruh kebutuhan pemeliharaan BMD	RK BMD, Kartu Kendali Inventaris
		1	Persentase dokumen penerapan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen penerapan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah Dokumen Penerapan RB yang harus dipenuhi	Data AKIP, Laporan Kinerja, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja, Dokumen Perencanaan
		2	Persentase dokumen pelaksanaan Pengendalian Internal SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen pengendalian Internal yang disusun tepat waktu ----- x 100 Jumlah Dokumen Penerapan RB yang harus dipenuhi	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Tugas : Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak
- Fungsi :
 - a. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
 - e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
 - f. pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
 - g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Peran serta Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase program pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Program yang dilengkapi Dokumen ARG}}{\text{Jumlah Program dalam APBD Kota Probolinggo}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen PPRG Perangkat Daerah • APBD Kota Probolinggo
		Jumlah laporan hasil advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah laporan hasil advokasi dan pendampingan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah • Data sasaran kegiatan pemberdayaan /pelatihan
		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah • Data sasaran kegiatan pemberdayaan /pelatihan
2.	Tersedianya Data Gender yang Terpilah	Persentase Data gender yang terkumpul dan terpilah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menyampaikan Data Pilah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal}} \times 100$	Data Terpilah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas	:	Melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Butir Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;3. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;4. Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;5. Pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;6. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;7. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal.8. Pelaksanaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri, meliputi Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri;
Tugas Lainnya	:	Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis yang terkait dengan tugas jabatannya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan PMKS serta terlaksananya layanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	$F(x) = \frac{\sum \text{PMKS} \text{luar panti yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar}}{\sum \text{populasi PMKS} \text{luar panti yang mendapatkan bantuan/layanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	Laporan persentase jumlah PMKS di luar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar
		Jumlah PMKS yang memperoleh Penyelenggaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	$F(x) = \frac{\sum \text{PMKS} \text{lainnya luar panti yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\sum \text{populasi PMKS} \text{lainnya luar panti yang mendapatkan bantuan/layanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	Laporan persentase jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial
2	Menurunnya angka kemiskinan dan terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	$F(x) = \frac{\sum \text{data fakir miskin cakupan daerah kota}}{\sum \text{populasi data fakir miskin kota}} \times 100\%$	Laporan persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota Probolinggo
3	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	$F(x) = \frac{\sum \text{KPM yang sudah penerima bantuan sosial}}{\sum \text{populasi KPM penerima bantuan sosial}} \times 100\%$	Laporan Jumlah penerima yang mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4	Terlaksananya Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bencana alam dan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	$F(x) = \frac{\sum \text{masyarakat sudah menerima bantuan korban bencana}}{\sum \text{masyarakat penerima bantuan korban bencana}} \times 100\%$	Laporan persentase Jumlah Penerima Bantuan Korban Bencana Alam/ Sosial
5	Tugas Lainnya	Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis yang terkait dengan tugas jabatannya	$F(x) = \frac{\sum \text{pelaksanaan tugas dinas lainnya yang sudah dilaksanakan}}{\sum \text{pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan}} \times 100\%$	Laporan Lisan/Tertulis terkait tugas lainnya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
- Tugas :
- a. Merumuskan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
 - e. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Menyiapkan bahan, fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
 - j. Melaksanakan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
 - k. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang pengarusutamaan hak anak;
 - l. Menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
 - m. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
 - n. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - o. Melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - p. Melaksanakan fungsi Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	1. Prosentase penurunan kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani	Prosentase penurunan kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani <u>jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani dan diselesaikan pada tahun N</u> ×100 Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang terlaksana	Laporan kasus kekerasan Perempuan
		2. Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah SDM yang Lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang telah tersertifikat <u>Penjelasan :</u> SDM yang Lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang telah tersertifikat	Sertifikat Lembaga penyedia layanan
		3. Prosentase penurunan kekerasan terhadap anak yang tertangani	Prosentase penurunan kekerasan terhadap Anak yang tertangani <u>jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani dan diselesaikan pada tahun N</u> ×100 Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang terlaksana	Laporan kasus kekerasan Anak
		4. Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah SDM yang Lembaga penyedia bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersertifikasi <u>Penjelasan :</u> SDM yang Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersertifikasi	Sertifikat Lembaga penyedia layanan
2.	Tercapainya indicator Kota Layak Anak	5. Prosentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non	Prosentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintahan dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Probolinggo <u>Penjelasan :</u>	Lembaga yang ada di Kota

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	<i>Jumlah Lembaga yang menjalankan fungsi Pengarusutamaan Hak Anak</i> $\frac{\text{Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha}}{\text{Jumlah Lembaga yang menjalankan fungsi Pengarusutamaan Hak Anak}} \times 100\%$	
		6. Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan Penjelasan: Jumlah Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Lembaga